

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Kinerja UMKM

Menurut Tika (2012:121), kinerja adalah hasil-hasil fungsi pekerjaan atau kegiatan individu maupun kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai suatu tujuan bersama dalam periode waktu yang sudah ditentukan. Fungsi pekerjaan yang dimaksudkan adalah, pelaksanaan tugas dan kewajiban yang sudah diberikan kepada individu atau kelompok tersebut untuk bisa diselesaikan karena sudah menjadi tanggung jawab bersama dalam kelompok tersebut.

Menurut Wilkinson (2002) menyatakan bahwa UMKM akan tumbuh dan berkembang apabila lingkungan dan atman mendukung. Lingkungan makro dikelola dengan baik, stabil dan dapat diprediksi. Informasi yang diperoleh dapat dipercaya, mudah diakses serta lingkungan sosial mendorong dan menghargai keberhasilan usaha tersebut. Terlepas dari hal diatas, kepiawaian pemilik dan stafnya juga perlu dihitung, kemudian produk atau jasa yang diproduksi oleh UMKM juga menentukan keberhasilan usaha tersebut. Hal ini tak lepas dari faktor internal dan eksternal sebagai penentu kinerja UMKM yang akan naik atau turun di masa depan.

Sidharta et al., (2014) membuktikan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja UMKM adalah faktor internal dan eksternal. Dan faktor yang sangat vital

adalah faktor internal, berikut adalah faktor internal yang mempengaruhi kinerja UMKM:

- a. Sumber daya manusia, yang meliputi, besaran gaji, jumlah insentif dan pemberian jaminan ketenagakerjaan, serta pembagian ketentuan kerja dan tugas kerja.
- b. Sumber daya alam, yaitu keunggulan yang dimiliki UMKM ketika digunakan untuk bertarung di pasar perdagangan, dan juga kearifan lokal dari daerah UMKM tersebut berdiri.
- c. Sumber daya finansial yang meliputi target keuangan yang di dapatkan dari modal yang digunakan.
- d. Sumber daya pemasaran yang meliputi strategi yang digunakan, kualitas dari produk yang dihasilkan.
- e. Sumber daya operasional yang meliputi alat produksi yang digunakan, kualitas bahan yang digunakan, serta lokasi berdirinya UMKM.
- f. *Personal cost*



Sedangkan faktor eksternal yang harus diperhitungkan demi menunjang kinerja UMKM yakni:

- 1) Informasi terkait kondisi pasar, target pasar yang dituju dan sesama pesaing.
- 2) Kebijakan ekonomi yang terjadi di negara tersebut.
- 3) Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di lingkungan sekitar UMKM.
- 4) Persediaan bahan baku dari pemasok

Kinerja UMKM sebenarnya tidak memiliki suatu patokan untuk bisa dihitung, karena aspek, kebijakan, dan kepentingan yang ingin diraih oleh pemilik

UMKM berbeda-beda. Tetapi bisa dipastikan suatu kinerja UMKM meningkat dapat dilihat dari adanya peningkatan baik di penjualan, modal usaha, pendapatan dan laba, adanya penambahan tenaga kerja yang digunakan, dan tentu saja pangsa pasar yang bertambah juga. Selain itu ekspansi kepada UMKM lain juga bisa menjadi suatu peningkatan kinerja UMKM itu sendiri, karena aspek dan tujuannya pun berbeda di tiap-tiap badan usaha.

Beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja UMKM antara lain adalah berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kemampuan kompetensi serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan di tiap-tiap pekerja, membuka akses keuangan yang lebih luas terhadap lembaga keuangan dengan cara mempermudah peninjauan modal usaha atau kredit, lalu meningkatkan kualitas produk yang mengacu pada standar produk dengan kualitas internasional, dan yang terakhir adalah menentukan target dan menerapkan strategi yang tepat agar produk bisa menembus pasar global.

2. Inklusi Keuangan

Menurut SNLKI (2017) inklusi keuangan merupakan ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan teori diatas maka penting untuk suatu negara dan semua elemen yang berperan mengembangkan kebijakan sektor keuangan yang pro dengan masyarakat miskin dengan menghilangkan tembok pembatas yang selama ini menghalangi siapa saja yang ingin mengaksesnya.

Ada tiga dimensi khusus inklusi keuangan yakni *outreach* atau di luar jangkauan, *usage* atau manfaat dan *quality* atau kualitas. Dimensi *outreach* merupakan dimensi yang menggambarkan sejauh mana penerima dapat menjangkau inti layanan jasa keuangan. Dimensi *usage* adalah dimensi yang mengukur kegunaan sistem keuangan yang sekarang yang sudah dimudahkan dengan adanya mesin ATM (*Automatic Teller Machine*), kantor cabang bank, depasan rumah tangga dan peminjam. Sedangkan dimensi *quality* memberikan gambaran level atau tingkat kepuasan yang diberikan lembaga keuangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang mengakses.

Dalam perkembangannya inklusi keuangan tidak hanya sebatas pengembangan produk dan layanan jasa keuangan tetapi juga mencakup empat elemen penting lainnya. Pertama, akses yang mencakup adanya infrastruktur yang disediakan oleh lembaga keuangan ditinjau agar masyarakat dapat menjangkau baik lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang bersifat formal. Kedua, ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan yang dibutuhkan oleh seluruh golongan masyarakat ditujukan agar setiap golongan tersebut mampu memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan. Ketiga, penggunaan produk dan layanan jasa keuangan merupakan tujuan akhir dari inklusi keuangan sebab yang diharapkan oleh pihak pemberi adalah kesejahteraan yang merata di masyarakat. Terakhir, kualitas dari produk dan layanan jasa keuangan yang baik sehingga ketika layanan ini dipakai oleh masyarakat memberikan manfaat yang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat.

Banyak negara di dunia yang mulai menerapkan kebijakan inklusi keuangan untuk menyamaratakan tingkat pendapatan pada masyarakat, namun sayangnya belum ada indikator untuk mengukur keberhasilan suatu kebijakan inklusi keuangan. Beberapa organisasi menerapkan standar mereka masing-masing untuk mengetahui dan mengukur keberhasilan kebijakan ini. Misalnya pada Bank Dunia (2008) menerapkan kebijakan industri padat tenaga kerja dibanding pada distribusi pendapatan. Membangun iklim yang nyaman dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan penyerapan tenaga kerja dan produktifitas pekerja bagi masyarakat miskin tentunya. Serta memberikan dukungan dan bantuan berupa non uang seperti jaminan kesehatan, pendidikan yang memadai, kemudahan akses ke tempat kerja demi menjamin kesejahteraan masyarakat miskin produktif.

3. Kemampuan Wirausaha

Kemampuan wirausaha menurut Sukirno (2003:7) adalah kemahiran yang dimiliki oleh suatu orang dan dibantu dengan tenaga kerja untuk mengorganisir sumber atau faktor produksi yang ada dalam suatu organisasi secara efektif dan tepat sehingga usaha yang dimiliki oleh organisasi bisa berjalan dan berkembang dengan baik serta yang paling penting adalah dapat menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitarnya.

Salah satu jiwa kewirausahaan yang biasanya dimiliki oleh wirausaha adalah kemampuan untuk mengelola usaha yang digelutinya. Ada empat faktor dominan yang disebut kemampuan berwirausaha. Pertama adalah kemampuan perencanaan yang meliputi perencanaan mulai awal berdiri, menjalankan dan

mengelola usaha untuk bisa bersaing. Kedua adalah mengorganisir yakni meliputi penyusunan setiap elemen-elemen perencanaan atau tugas untuk bisa mencapai tujuan. Ketiga, seseorang harus mempunyai visualisasi usaha yakni pengembangan dari bentuk ide atau perencanaan, gagasan menjadi sebuah bentuk nyata atau bentuk fisik. Terakhir, Pengelolaan sumber daya manusia yang bagus yang meliputi pemberian tugas kerja dan instruksi sehingga karyawan bekerja sesuai kehendak pemilik usaha. Kemampuan tersebut tentu akan sangat membantu banyak ketika sudah mendirikan usaha (Sari, 2014).

4. Lembaga Keuangan Mikro

Berdasarkan Keppres No. 61 Tahun 1988 Lembaga keuangan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Sistem lembaga keuangan dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Lembaga keuangan bank dimana sesuai dengan UU No. 10 tahun 1967, bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain guna meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak
2. Lembaga keuangan bukan bank. Lembaga yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai suatu bentuk investasi

3. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.

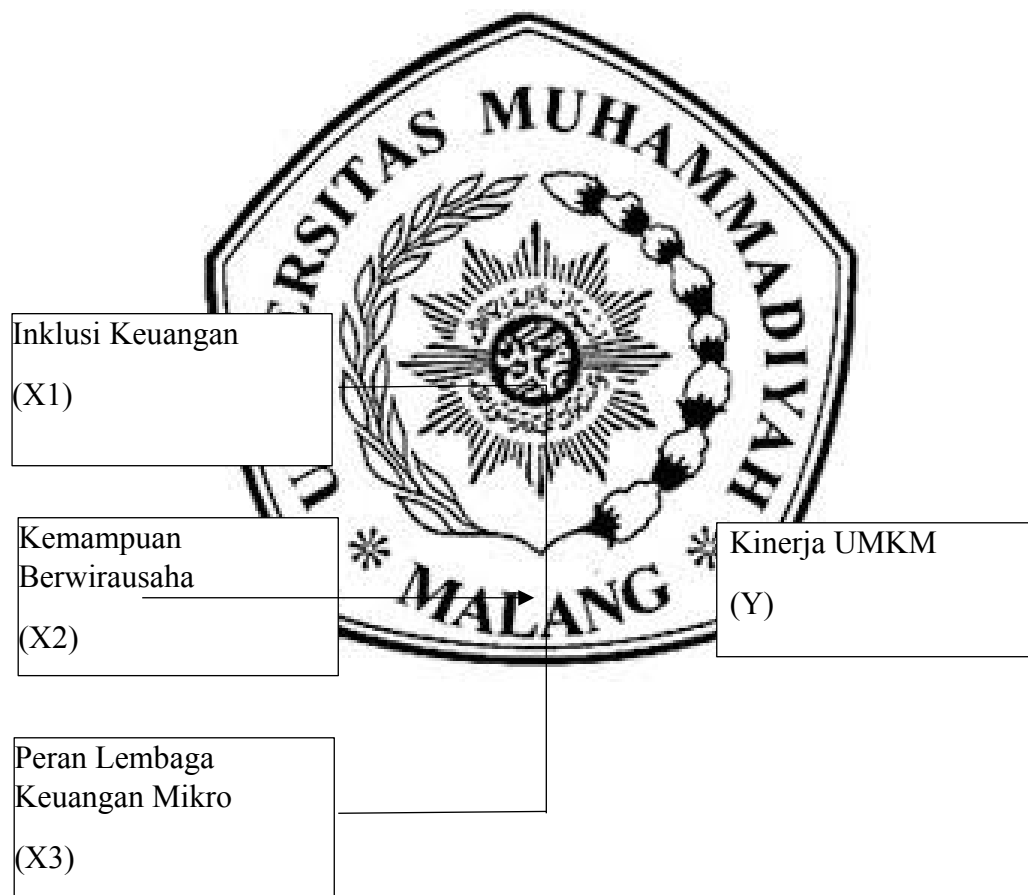
Menurut Rofiah (2011) lembaga keuangan mikro adalah lembaga yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang berorientasi bisnis dan belum terlayani oleh lembaga keuangan formal. Lembaga keuangan mikro di Indonesia menurut bank Indonesia dibagi menjadi dua kategori yaitu lembaga keuangan mikro yang berbasis bank dan non bank. Lembaga keuangan mikro berbasis bank yaitu BRI unit desa, BPR, BKD (Bank Kredit Desa). Sedangkan yang berbasis non bank yaitu KSP, GSP, Barul Mal, Watanwili, LSM, arisan dan kelompok swadaya masyarakat.

Berkembangnya lembaga keuangan mikro di tingkat desa, secara tidak langsung akan memicu minat masyarakat desa untuk berusaha menumbuhkan pengusaha-pengusaha mikro dan kecil di pedesaan dan dampak jangka panjangnya juga ikut membantu merealisasikan program pemerintah untuk:

- a. Meningkatkan produktivitas usaha masyarakat kecil di desa.
- b. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
- c. Menstabilkan ekonomi negara jangka panjang.
- d. Menunjang program pemerintah dalam mengupayakan pemerataan pendapatan penduduk desa dan juga upaya pengentasan kemiskinan.

B. Kerangka Pikir dan Hipotesis

Kerangka pikir dalam penelitian ini digunakan sebagai acuan peneliti untuk mempermudah dalam penelitian agar memiliki arah dan sesuai dengan tujuan. Suatu kerangka berfikir akan memberikan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi masalah (objek) penelitian. Maka dapat digambarkan kerangka penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Pada gambar diatas, ada 3 variabel independen, yaitu inklusi keuangan (X1), kemampuan berwirausaha (X2), dan peran lembaga keuangan mikro (X3)

dan satu variabel dependen yakni Kinerja UMKM (Y). Garis hitam yang tergambar lurus dari ketiga variabel X menuju ke variabel Y memberikan gambaran mengenai pengaruh yang diberikan oleh variabel X terhadap variabel Y. Dalam menentukan hipotesis, peneliti merujuk pada rumusan masalah. Pada bab sebelumnya, peneliti telah merumuskan 3 rumusan masalah.

Fahmy, dkk (2016) menyebutkan bahwa inklusi keuangan berpengaruh terhadap UMKM. Akses perbankan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit yang disalurkan pada sektor UMKM. Semakin banyak jaringan kantor bank, maka semakin besar kredit yang terserap pada sektor tersebut. Penggunaan layanan perbankan juga berpengaruh terhadap perkembangan UMKM. Semakin banyak penggunaan layanan bank oleh UMKM, maka semakin besar juga pertumbuhan UMKM. Hal ini juga sesuai dengan penelitian dari Sanistasya dkk (2019) menyatakan bahwa Inklusi Keuangan berpengaruh secara langsung terhadap Kinerja UMKM. Artinya ketika variabel Inklusi Keuangan dinaikkan maka variabel Kinerja UMKM juga akan meningkat.

H1: Inklusi Keuangan berpengaruh terhadap Kinerja UMKM.

Christiana dkk (2014) menjelaskan bahwa kompetensi berwirausaha memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja usaha. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh positif, hal ini berarti apabila semakin tinggi kompetensi wirausaha maka akan menciptakan perkembangan UMKM yang semakin tinggi pula. Utami (2016) juga mengatakan bahwa kompetensi kewirausahaan masuk dalam kategori baik. Hal ini sesuai dengan hasil penelitiannya yang mengenai kemampuan berwirausaha menunjukkan hasil sebesar 61,7% yang berpengaruh

terhadap kinerja UMKM. Sedangkan sisanya sebesar 38,3% dipengaruhi oleh faktor lain seperti SDM, Motivasi dan Pendampingan.

H2: Kemampuan Berwirausaha berpengaruh terhadap Kinerja UMKM.

Saidiah dan Dianasari (2014) mengatakan bahwa Lembaga Keuangan Mikro memiliki peran yang signifikan terhadap suatu usaha. Peran Lembaga Keuangan mikro dianggap sangat penting sebagai perantara keuangan yang bertujuan menyediakan akses yang lebih mudah untuk memperoleh pinjaman bagi orang-orang berpenghasilan rendah atau untuk kinerja usaha.

H3: Peran Lembaga Keuangan Mikro berpengaruh terhadap Kinerja UMKM

